Perubahan Nilai dan Orientasi Masyarakat Tani di Indonesia[2]

Dr. Yunita T. Winarto

Pendahuluan

Kebudayaan itu dinamis. Tidak ada nilai budaya, norma, ataupun pengetahuan dari suatu kelompok masyarakat yang tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Namun, bagaimanakah perubahan itu terjadi, dalam hal apa, berapa lama, dan dalam situasi serta konteks apakah hal itu terjadi merupakan fenomena sosial-budaya yang perlu dicermati secara seksama. Pemahaman itu memungkinkan kita untuk menjelaskan berbagai dinamika sosial-budaya yang terjadi dalam kehidupan beragam komunitas, kelompok sosial, dan lapisan masyarakat. Masyarakat tani yang dari hari ke hari, musim ke musim bergumul dengan kondisi habitatnya, petak-petak sawah dan ladang yang acap menyajikan berbagai tantangan dan masalah, merupakan insan-insan yang amat responsif dan kreatif. Merekalah pencipta pengetahuan, strategi, dan produk pertanian yang tangguh. Jika teknologi pertanian yang selama ini direkomendasikan 'dari atas' diklaim sebagai hasil ciptaan para 'ilmuwan', bagaimanakah para petani dapat dinyatakan sebagai 'pencipta pengetahuan dan strategi bercocok tanam'? Jawaban atas pertanyaan itu menuntun kita untuk

---

[2] Makalah ini dipresentasikan dalam Lokakarya tentang 'Pemberdayaan Masyarakat Petani Peduli Lingkungan', diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Bogor, 28—29 Agustus 2002.

menyimak ulang perjalanan sejarah perkembangan kebudayaan cocok tanam di Indonesia, terutama di antara mereka yang mengalami perubahan amat drastis di akhir tahun 60-an dengan diperkenalkannya program BIMAS dan INMAS yang di dunia internasional dikenal dengan sebutan 'Revolusi Hijau' (*Green Revolution*).

Introduksi paket-paket teknologi itu merupakan awal dari masuknya 'hubungan kekuasaan' dalam kehidupan sehari-hari petani di bumi nusantara ini. Ungkapan seorang petani yang mengalami masa bercocok tanam sebelum masa Revolusi Hijau jelas mencerminkan perubahan amat drastis yang mereka alami: '...dulu tanam padi semau kita, apa yang mau ditanam, kapan menanam...sekarang semua diatur pemerintah: apa jenis padi yang harus ditanam, kapan mulai tanam, bagaimana menanamnya.' Pemaksaan jenis padi varietas unggul atau yang diistilahkan petani sendiri sebagai 'padi pemerintah', atau 'padi pendek' merupakan awal dari 'ketidakbebasan' mereka sebagai pencipta pengetahuan, strategi, dan produk pertanian. Jika kini perubahan nilai dan orientasi petani dipermasalahkan, dalam konteks apakah hal itu menjadi bermakna penting, bagi siapa, dan untuk apa?

Seiring dengan tema lokakarya yakni 'Pemberdayaan Masyarakat Petani Peduli Lingkungan', maka nampaknya jargon 'pemberdayaan' itulah yang kini menjadi titik tolak untuk mempermasalahkan para petani yang 'belum mampu memberdayakan diri'. Memberdayakan diri dari apakah yang dimaksud pihak-pihak nonpetani? Dalam konteks perubahan drastis yang dialami petani dengan diperkenalkannya Revolusi Hijau, maka 'pemberdayaan' itu mungkin terkait dengan 'kungkungan kekuasaan' yang dialami petani.

Benarkah demikian? Jika ya, maka benarkah bahwa masalah yang paling mendasar adalah 'memberdayakan' petani? Tidakkah seyogianya fokus perhatian ditujukan lebih pada upaya 'memberdayakan' para pejabat negara dan ilmuwan, agar mereka terbebas dari orientasi nilai sebagai pihak yang 'paling berwenang dalam menentukan kebijakan, strategi, dan teknologi cocok tanam'?

Perubahan paradigma 'hubungan kekuasaan' dalam pengembangan pertanian di Indonesia merupakan hal yang amat signifikan untuk segera dipikirkan bersama dan dilaksanakan (lihat Winarto, Maidi dan Darmowiyoto 1999; Winarto dan Choesin 2001; Winarto 2002). Dalam konteks itulah tulisan ini mengulas perubahan yang dialami petani dalam satu dekade terakhir saat berbagai paket teknologi pertanian masih diintroduksikan pada petani, beriringan dengan diperkenalkannya Program Pengendalian Hama Terpadu sejak tahun 1990. Dalam tulisan ini saya beranggapan bahwa Program Pengendalian Hama Terpadu (PHT) itu memiliki implikasi yang signifikan, tidak hanya bagi 'pemberdayaan' petani yang selama tiga dekade mengalami 'kungkungan kebebasan' berkarya, tetapi juga bagi tumbuh kembangnya benih-benih perubahan dalam konstelasi 'hubungan kekuasaan' itu sendiri. Dalam hal-hal apa sajakah terjadi perubahan, dan bagaimanakah hal itu terjadi?

Untuk mengkaji perubahan itu saya mengacu pada mekanisme belajar petani dan proses pembelajaran yang dialami petani guna memahami pengayaan pengetahuan yang terjadi, konteks berlangsungnya pembelajaran itu, dan implikasinya pada strategi cocok tanam. Telah banyak tulisan yang menunjukkan bahwa petani adalah pengamat yang unggul. Mereka juga adalah pelaku-pelaku eksperimen dalam berbagai hal (lihat Richards 1989; Rhoades dan

Bebbington 1995). Bagian pertama makalah ini akan mengulas hal itu, serta perubahan yang terjadi dari masa Revolusi Hijau ke Pengendalian Hama Terpadu. Bagian kedua dan ketiga makalah ini mengetengahkan berbagai kisah tumbuh kembangnya 'benih-benih pengetahuan' dan 'benih-benih pemberdayaan' serta implikasinya bagi kehidupan mereka sendiri, dan bagi 'hubungan kekuasaan' yang terjadi masa kini.

Melaksanakan instruksi, mengembangkan kreasi: dari Revolusi Hijau ke Pengendalian Hama Terpadu

Petani adalah pengamat yang handal dan unggul. Pengamatan merupakan ujung tombak dari seluruh kegiatan cocok tanam, karena dari hasil pengamatanlah petani menginterpretasikan berbagai fenomena alam di lahan sawahnya. Dari pengamatan pulalah petani mengembangkan berbagai kegiatan uji coba yang terus dikembangkan dari hari ke hari, musim ke musim hingga diperoleh strategi yang menurutnya efektif dan jitu. Pengamatan dengan panca indera, uji coba, dan interpretasi, itulah mekanisme utama dalam proses belajar mereka. Hal itu merupakan 'kekuatan' sekaligus 'kelemahan' dalam kegiatan belajar mereka. Mengapa? Melaksanakan, mengalami, dan mengamati dengan panca indera memungkinkan petani untuk tidak hanya 'peduli lingkungan hidup', tetapi juga 'menggumuli' dan selalu 'mempertanyakan' serta 'belajar' dari apa yang terjadi di lahannya. Dengan bertumpu pada interpretasi atas hasil pengamatan itu yang diperkuat dengan acuan komparatif serta pengalaman diri yang amat kaya, mereka pun mengambil tindakan atas apa yang dianggapnya 'tepat' dan 'jitu' dalam situasi

'pengetahuan', tentunya tidak pula menjadi bagian dari fenomena yang penting bagi hidupnya. Bertolak dari hal ini Bentley (1992) telah pula merekomendasikan agar intervensi pengetahuan yang dilakukan 'ilmuwan' seyogianya memperhatikan hal-hal apa yang belum diketahui petani secara jelas, dan tidak menjadi bagian yang penting secara budaya dalam kehidupan mereka.

Apakah Revolusi Hijau yang diperkenalkan di Jawa dan di tempat-tempat lain di Indonesia pada masa akhir dekade 60-an bertumpu pada kenyataan tersebut? Apakah introduksi berbagai paket pertanian itu menjadikan petani semakin memahami kondisi lingkungan hidupnya, memperkaya pengetahuannya, dan semakin kukuh memperkuat posisi petani sebagai 'tuan di lahannya sendiri'? Argumentasi saya adalah jelas: tidak. Bahkan, Revolusi Hijau telah menjadikan petani teralienasi dari fenomena nyata lingkungan hidupnya, dan menjadikannya semakin tergantung pada kebijakan dan uluran bantuan pemerintah dan berbagai pihak yang lain. 'Masa pembodohan', itulah ungkapan yang digunakan petani di Lampung Tengah dalam mencirikan masa-masa yang mereka alami pada tiga dekade terakhir (lihat Winarto, Maidi, Darmowiyoto 1999). Mengapa? Introduksi paket-paket teknologi tanpa dibarengi dengan seperangkat pengetahuan yang rinci dan kaya mengenai substansi, dan implikasinya bagi diri pengguna dan lingkungan hidupnya, itulah yang melandasi berbagai program intensifikasi pangan. Seperangkat ide-ide apakah yang diperkenalkan pada petani saat pemerintah 'memaksa' petani menggunakan pupuk urea, menanam 'padi pemerintah', dan menggunakan 'obat-obatan'? Seperangkat ide tentang cara menggunakan berbagai komponen itu beserta hasil yang diperoleh itulah yang diperkenalkan; dan tidak tentang berbagai

karakter, substansi dan implikasi dari teknologi itu yang memang tidak menjadi bagian dari domain pengetahuan petani. Apakah introduksi berbagai paket itu menjadikan petani semakin bijak, dan mampu mengambil keputusan secara mandiri atas berbagai masalah yang dihadapi dalam lingkungan hidupnya? Jawabannya pun jelas: tidak. Petani hanya menjadi pengguna teknologi, dan harus menjadi pengguna yang baik dan patuh agar diperoleh hasil maksimal dari penerapan teknologi itu.

Namun, petani adalah pelaku yang kreatif dan inovatif. Introduksi berbagai paket teknologi dan keharusan menerapkan 'aturan pemerintah' itu tidak berarti bahwa kegiatan uji-coba terhenti. Mereka tetap melaksanakan uji-coba dalam menerapkan komponen-komponen teknologi itu sesuai dengan kondisi sumberdaya alam, tenaga, dan modal yang dimiliki dengan hasil yang amat bervariasi (lihat Winarto 1996). Orientasi mereka jelas: bagaimana agar panen berhasil baik tanpa kegagalan dengan teknologi yang harus mereka terapkan, tetapi dengan penuh kendala dan keterbatasan. Tidak hanya itu. Orientasi nilai komersial, dan penempatan produktivitas di atas ketangguhan (keberlanjutan atau *sustainability*) pun lambat laun menjadi bagian integral dari sasaran mereka bercocok tanam. 'Berapa ton per hektar panen Anda?'; 'Berapa harga jual per kuintal?', menjadi pertanyaan yang amat lazim di antara sesama petani di kala panen tiba. Jika hasil panen tidak memuaskan, maka mereka pasti berupaya mencari jawabnya dengan mengacu pada berbagai hal yang terjadi dan yang dialami selama satu musim tanam. Hal itu memfokus pada: jenis, karakteristik dan kualitas benih padi yang ditanam; strategi cocok tanam yang mereka lakukan; kuantitas dan bahkan kualitas komponen produksi yang mereka gunakan; serta

kondisi alam menyangkut suplai air, curah hujan, cuaca, dan serangan hama/penyakit. Melalui upaya pencarian tahu, dan melakukan perbandingan dengan hasil produksi dan strategi sesama petani itulah pengetahuan dan pengalaman mereka semakin kaya. Karena itu, petani adalah pelaku aktif yang amat peduli dengan lingkungan hidupnya. Mereka adalah ahli ekologi yang ulung, karena selalu mengaitkan satu komponen dengan komponen lain dalam lingkungan sawah/ladangnya. Bila demikian halnya, mengapa pemberdayaan petani peduli lingkungan hidup dipermasalahkan?

Jawaban atas pertanyaan itu tentunya terkait dengan konsekuensi dari Revolusi Hijau itu sendiri, yakni aplikasi teknologi yang menimbulkan dampak negatif pada kondisi habitat petani itu sendiri tanpa mereka pahami sebab musababnya. Penggunaan istilah 'obat' untuk pestisida, serta instruksi untuk mengaplikasikan pestisida secara berjangka tanpa penjelasan tentang substansi, derajat keracunannya, apa saja yang terbunuh dan konsekuensinya merupakan contoh dari faktor-faktor penjelas mengapa petani 'seakan tidak peduli pada lingkungan hidupnya'. Jika petani mengetahui dampak negatif dari penggunaan pestisida yang membunuh sejumlah hewan di lahannya, maka hal itu justru diinterpretasikan dalam perspektif 'keampuhan obat untuk membunuh hama dan menyembuhkan padinya dari penyakit'. Dalam fenomena ini, banyak hal yang tidak secara langsung mampu diamati oleh petani hubungan sebab-akibatnya. Keterbatasan ide atau konsep jelas tidak mendukung interpretasi yang sesuai dengan kondisi riel. Dalam kondisi semacam itulah program Pengendalian Hama Terpadu (PHT) diperkenalkan ke petani untuk pertama kalinya pada tahun 1990

Program tersebut terutama bertujuan untuk menjadikan petani sebagai 'akhli Pengendalian Hama Terpadu di lahannya sendiri'; 'memberdayakan' petani dari rekomendasi-rekomendasi yang justru merugikan petani dan kondisi lahannya; mempertajam kemampuan pengamatan petani; dan melestarikan lingkungan dengan mengonservasi musuh alami. Yang terpenting adalah merubah paradigma yang telah terinternalisasi dalam diri individu-individu petani, yakni dari 'membunuh hama dengan pestisida' menjadi 'membudidayakan tanaman sehat berdasarkan analisis agroekosistem'. Perubahan yang terjadi memang langsung mengarah pada hal-hal amat mendasar dalam kebudayaan petani, yakni mengubah cara belajar dan mekanisme perolehan pengetahuan. Hasil pengamatan dan analisisnya sendiri itulah yang diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan yang tidak selalu harus sejalan dengan rekomendasi dan instruksi pemerintah dalam penggunaan berbagai produk. Hal itu tidak hanya memotivasi tumbuh kembangnya 'Sains Petani', hasil akumulasi pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan uji-coba petani sendiri yang lebih tersistematisasi dan terukur; tetapi juga mempertebal keyakinan petani atas hasil temuannya sendiri.

'Masa Pencerdasan', itulah istilah yang digunakan petani di Lampung Tengah dalam menyirikan perbedaan utama strategi PHT dari Revolusi Hijau. Banyak petani merasa berterima kasih atas pengenalan konsep-konsep dan ide-ide yang semula tidak mereka ketahui dan pahami, dan tidak menjadi bagian penting 'secara budaya' dalam kehidupan mereka. Konsep-konsep dan ide-ide itu memperkaya 'peta kognisi' mereka dan menjembatani 'simpul-simpul pengetahuan' yang terbentuk melalui pengenalan berbagai paket teknologi itu. Contoh yang amat jelas ialah konsep 'musuh alami'

Program tersebut terutama bertujuan untuk menjadikan petani sebagai 'akhli Pengendalian Hama Terpadu di lahannya sendiri'; 'memberdayakan' petani dari rekomendasi-rekomendasi yang justru merugikan petani dan kondisi lahannya; mempertajam kemampuan pengamatan petani; dan melestarikan lingkungan dengan mengonservasi musuh alami. Yang terpenting adalah merubah paradigma yang telah terinternalisasi dalam diri individu-individu petani, yakni dari 'membunuh hama dengan pestisida' menjadi 'membudidayakan tanaman sehat berdasarkan analisis agroekosistem'. Perubahan yang terjadi memang langsung mengarah pada hal-hal amat mendasar dalam kebudayaan petani, yakni mengubah cara belajar dan mekanisme perolehan pengetahuan. Hasil pengamatan dan analisisnya sendiri itulah yang diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan yang tidak selalu harus sejalan dengan rekomendasi dan instruksi pemerintah dalam penggunaan berbagai produk. Hal itu tidak hanya memotivasi tumbuh kembangnya 'Sains Petani', hasil akumulasi pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan uji-coba petani sendiri yang lebih tersistematisasi dan terukur; tetapi juga mempertebal keyakinan petani atas hasil temuannya sendiri.

'Masa Pencerdasan', itulah istilah yang digunakan petani di Lampung Tengah dalam menyirikan perbedaan utama strategi PHT dari Revolusi Hijau. Banyak petani merasa berterima kasih atas pengenalan konsep-konsep dan ide-ide yang semula tidak mereka ketahui dan pahami, dan tidak menjadi bagian penting 'secara budaya' dalam kehidupan mereka. Konsep-konsep dan ide-ide itu memperkaya 'peta kognisi' mereka dan menjembatani 'simpul-simpul pengetahuan' yang terbentuk melalui pengenalan berbagai paket teknologi itu. Contoh yang amat jelas ialah konsep 'musuh alami'

yang dapat berupa serangga; dan bahwa musuh alami itu merupakan pemangsa hama yang dapat punah oleh pestisida. Akibatnya, populasi hama pun dapat merajalela tanpa pemangsa. Konsep yang lain adalah 'kekebalan'. Bahwa hama dapat menjadi 'kebal' karena pestisida tidaklah mereka pahami sebelumnya. Konsep ini pun tidak semudah 'musuh alami' dalam hal pemahamannya, karena tidak semudah musuh alami pula untuk diamati; bahkan tidak akan teramati dengan panca indera mereka. Konsep semacam ini akan tetap merupakan konsep yang 'abstrak' tanpa bukti-bukti empiris. Terlepas dari hal itu, kedua contoh ini menunjukkan bahwa jaringan simpul-simpul pengetahuan dalam peta kognisi petani menjadi semakin kaya. Hal itu memungkinkan mereka untuk menginterpretasi tindakan, hasil tindakan, serta kondisi lahannya secara berbeda dibandingkan dengan tidak adanya 'simpul-simpul pengetahuan yang baru' itu. Hal yang juga amat signifikan bagi kekayaan pengetahuan petani adalah cara perolehan pengetahuan melalui pengamatan secara rinci, berulang, atau dengan menggunakan sampel, dan dengan peralatan tambahan, sekalipun itu terdiri dari bahan yang mudah ditemukan dalam lingkungannya (kantong plastik, botol aqua, kain kelambu, tali rafia, jaring, bambu, dsbnya).

Cara perolehan pengetahuan dan pengayaan konsep ini merupakan tonggak perubahan yang sangat berarti bagi masyarakat petani itu sendiri. Sekalipun mereka adalah penemu dan pencipta pengetahuan, tetapi kungkungan 'kekuasaan' dalam menentukan teknologi dan strategi cocok tanam selama tiga dekade terakhir menyebabkan terpinggirkannya mereka sebagai 'pencipta ilmu bercocok tanam'. Dengan pengayaan pengetahuan dan cara perolehan pengetahuan yang dipelajari melalui PHT (melalui Sekolah

Lapang Pengendalian Hama Terpadu-SLPHT), jati diri mereka sebagai 'penemu dan pencipta pengetahuan' pun terbentuk dan berkembang. 'Sains Petani' (*Farmers' Science*) itulah julukan untuk berbagai kegiatan uji-coba dan produk yang dihasilkannya sendiri. Melalui berbagai kegiatan 'Sains Petani' itu, petani mencoba bereksperimen menghasilkan strategi cocok tanam dan komponen teknologi yang lebih mengutamakan 'ketangguhan' daripada 'produktivitas', 'kesehatan' daripada 'pencemaran', 'kelestarian lingkungan' daripada 'pengrusakan', 'kebebasan dan keadilan bagi petani' ketimbang 'penindasan dan ketidakadilan'. Apa yang signifikan dari hal itu adalah timbulnya kesadaran petani tentang perlunya paradigma dan tujuan Revolusi Hijau itu ditinggalkan untuk kembali ke situasi dengan 'kedaulatan di tangan petani', seperti pada masa sebelum 'padi pemerintah' diperkenalkan. Seorang petani berusia lanjut di Ciasem Baru, Jawa Barat menuturkan interpretasinya bahwa '...maksud PHT itu mau membawa petani kembali ke zaman dulu, sebelum dikenalnya "obat-obatan".' Terkandung di dalamnya adalah pengertian petani tentang upaya untuk 'kembali ke alam' dan ke 'alam kebebasan petani'. Apa yang paling mutakhir mulai didengungkan oleh sejumlah petani adalah apa yang disebut dengan 'Kedaulatan Petani dan Kedaulatan Pangan' (Juwari, Hidayat, dan Adinata 2002; lihat Wienarto 2002). Dalam situasi perubahan ini, bagaimanakah 'benih-benih pengetahuan dan pemberdayaan' itu tumbuh kembang?

Benih-benih pengetahuan

Tidak dapat dipungkiri bahwa Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) yang untuk pertama kali diuji-cobakan di Kabupaten Yogyakarta pada akhir tahun 1990 dan kemudian tersebar di banyak tempat selama dekade 90-an telah menghasilkan 'benih-benih pengetahuan' di antara jutaan petani. Mereka adalah para petani yang diikutsertakan dalam kegiatan sekolah lapang itu selama satu musim tanam yang kemudian dikenal dengan petani PHT atau alumni PHT. 'Benih-benih pengetahuan' sebagai suatu metafora saya pandang tepat untuk mencerminkan kondisi para petani PHT itu. Ada di antara benih-benih itu yang tumbuh di lahan yang gersang, tidak terawat; atau sebaliknya, di lahan yang subur dan terawat baik. Sejauhmanakah benih-benih itu dapat tumbuh kembang dengan baik, tergantung tidak hanya dari kondisi lahan tempat tumbuhnya, dan perawatan yang diberikan oleh si penggarap lahan, tetapi juga dari kualitas benih itu sendiri. Kondisi dan perkembangan para petani PHT di banyak tempat di Indonesia secara nyata menunjukkan variasi itu.

Di sejumlah lokasi seperti yang saya temukan di lokasi penelitian saya di awal tahun 1990—92 di pantai utara Jawa Barat (Ciasem Baru dan Ciasem Tengah, Jawa Barat), dan di Batanghari, Lampung Tengah di tahun 1998—99, ada SLPHT yang 'tidak tergarap dan terselesaikan dengan baik'. Sejumlah kecil lulusan SLPHT itu hanya terdiri dari 'benih-benih'yang belum menguasai secara tuntas dan komprehensif apa itu PHT. Mereka pun tidak mampu untuk tumbuh kembang di 'lahan' yang sebagian besar 'benih tumbuhannya' tidak atau belum mengenali PHT dengan seperangkat pengetahuan, konsep, serta praktiknya. Hal itu terjadi di Kebon Cau di Ciasem Baru,

Lapang Pengendalian Hama Terpadu-SLPHT), jati diri mereka sebagai 'penemu dan pencipta pengetahuan' pun terbentuk dan berkembang. 'Sains Petani' (*Farmers' Science*) itulah julukan untuk berbagai kegiatan uji-coba dan produk yang dihasilkannya sendiri. Melalui berbagai kegiatan 'Sains Petani' itu, petani mencoba bereksperimen menghasilkan strategi cocok tanam dan komponen teknologi yang lebih mengutamakan 'ketangguhan' daripada 'produktivitas', 'kesehatan' daripada 'pencemaran', 'kelestarian lingkungan' daripada 'pengrusakan', 'kebebasan dan keadilan bagi petani' ketimbang 'penindasan dan ketidakadilan'. Apa yang signifikan dari hal itu adalah timbulnya kesadaran petani tentang perlunya paradigma dan tujuan Revolusi Hijau itu ditinggalkan untuk kembali ke situasi dengan 'kedaulatan di tangan petani', seperti pada masa sebelum 'padi pemerintah' diperkenalkan. Seorang petani berusia lanjut di Ciasem Baru, Jawa Barat menuturkan interpretasinya bahwa '...maksud PHT itu mau membawa petani kembali ke zaman dulu, sebelum dikenalnya "obat-obatan".' Terkandung di dalamnya adalah pengertian petani tentang upaya untuk 'kembali ke alam' dan ke 'alam kebebasan petani'. Apa yang paling mutakhir mulai didengungkan oleh sejumlah petani adalah apa yang disebut dengan 'Kedaulatan Petani dan Kedaulatan Pangan' (Juwari, Hidayat, dan Adinata 2002; lihat Wienarto 2002). Dalam situasi perubahan ini, bagaimanakah 'benih-benih pengetahuan dan pemberdayaan' itu tumbuh kembang?

Jawa Barat, dan di Batanghari, Lampung Tengah. Di sejumlah lokasi yang lain, para alumni SLPHT itu menunjukkan kualitas sebagai petani yang amat kreatif, inovatif, dan memiliki pemahaman yang tajam seperti di Marga Tani, Ciasem Baru. Dengan motivasi dan komitmen yang amat tinggi mereka berupaya untuk mengubah praktik dan strategi cocok tanamnya sesuai dengan apa yang diajarkan di SLPHT. Namun, mereka hanyalah sejumlah kecil 'benih' di lahan yang amat luas dengan begitu banyak 'benih-benih lain' tanpa asuhan dan perawatan yang intensif, dan tanpa daya dari 'benih-benih PHT itu sendiri' untuk mengubah perspektif mereka, dan berjuang mengatasi berbagai tantangan dan kendala. Alhasil, tidak sedikit di antara petani PHT yang kembali menjadi 'benih-benih Revolusi Hijau' dengan pestisida sebagai 'senjata pamungkas' dalam menanggulangi serangan hama dan penyakit (lihat Winarto 1996). Walau demikian, sekelompok kecil 'benih-benih PHT' itu mampu menjadi inovator dan motivator bagi 'benih-benih' lain di saat mereka menghadapi serangan hama penggerek batang yang berkelanjutan selama dua tahun berturut-turut (1990—92). Dalam kondisi serangan hama yang berkelanjutan itulah, 'benih-benih PHT yang inovatif dan kreatif' itu tertantang untuk mencobakan konsep-konsep, ide-ide, dan praktik-praktik yang baru dikenalnya itu dalam kegiatan nyata pengendalian hama. Tidak hanya mencobakan apa yang mereka terima melalui para pelatih di SLPHT yang mereka lakukan, tetapi uji-coba atas modifikasi dari apa yang diajarkan dan apa yang mereka kembangkan, dibarengi dengan pengamatan dan pengujian kembali, itulah yang terus diupayakan dari hari ke hari, musim ke musim. Pengayaan pengetahuan tentang siklus hidup hama penggerek batang padi putih; efektivitas cara pengendalian untuk setiap tahap

siklus hidup itu; serta upaya untuk meninggalkan strategi penyemprotan 'obat secara berjadwal' merupakan bukti nyata dari tumbuh kembangnya 'benih-benih PHT' itu (lihat Winarto 1996, 1998).

Di banyak 'lahan' yang lain, dengan upaya sendiri, atau dengan perawatan yang cukup intensif dari mereka yang mendampingi para alumni PHT itu, bertumbuhkembang pulalah 'benih-benih PHT' yang subur dan bernas. Apa yang saya temukan di Desa Kalensari, Indramayu dan di Karang Endah, Lampung Tengah merupakan bukti dari 'benih-benih PHT' semacam itu. Di Kalensari, dengan dampingan dari FAO dalam Riset Aksi Petani (*Farmers' Action Research*), mereka secara amat serius melakukan berbagai uji coba untuk mengembangkan strategi pengendalian hama penggerek batang nonpestisida. Hasil uji-coba itu pun telah disosialisasikan pada warga petani di desanya dan desa tetangga dalam kondisi nyata serangan hama. Bahkan, strategi itu telah pula disosialisasikan ke para pejabat dan berhasil diintegrasikan dalam kebijakan Bupati untuk pengendalian hama penggerek batang di tingkat kabupaten (lihat Busyairi dkk. 1999). Di Karang Endah, para alumni PHT itu secara konsisten berupaya dengan serius untuk tidak hanya menyempurnakan proses tumbuh kembang mereka sendiri, tetapi juga menumbuhkembangkan benih-benih yang lain. Mereka berinisiatif untuk menyelenggarakan SLPHT lanjutan, tidak hanya padi, tetapi juga untuk kedelai dan cabai. Tidak hanya itu. Mereka pun mengupayakan untuk melaksanakan unit-unit SLPHT padi, padi tindak lanjut, kedelai, kedelai tindak lanjut, dan cabai untuk sesamanya yang tinggal di kampung, desa, dan kecamatan tetangga. Upaya ini bukanlah merupakan upaya yang sederhana, karena

melibatkan suatu karya besar dalam membentuk organisasi, menumbuhkembangkan para petani pemandu terlebih dahulu sebelum mampu menumbuhkembangkan benih-benih PHT yang lain, menciptakan aturan perekrutan dan pengawasan, menyempurnakan kurikulum SLPHT nasional, menyiapkan materi, mendesain macam-macam Sains Petani, dan lain-lain (lihat Winarto dkk. 2000).

Melalui kegiatan itulah, maka lambat laun semakin besar jumlah 'benih-benih PHT' itu yang tumbuh kembang. Dengan semakin banyaknya jumlah petani yang memahami apa itu PHT, beserta perangkat konsep dan praktiknya, maka semakin nyamanlah 'lahan' yang tercipta dengan lebih banyaknya mereka yang memiliki skema interpretasi yang sama. Semakin mudah pula 'benih-benih PHT' itu bertumbuh kembang, dengan persepsi, orientasi, nilai, dan strategi yang dipahami dan disepakati oleh sejumlah besar individu. Berbeda dari situasi yang dihadapi sejumlah petani PHT di Ciasem Baru yang harus terus berjuang di tengah ratusan petani non-PHT yang lain, maka situasi di Karang Endah mendukung terciptanya kondisi tempat mereka dapat saling bertukarpikiran, bertukarpengalaman, memperkaya satu dengan yang lain, dan memperteguh keyakinan. Namun, hal itu pun tidak tercapai dengan mudah, karena masalah dan kendala yang sama dihadapi oleh sejumlah alumni PHT. Tanpa dukungan pendampingan yang kontinyu, dengan mudah mereka kembali pada praktik lama ala Revolusi Hijau. Atau, tidak mudahnya petani PHT untuk meninggalkan sama sekali pengendalian hama dengan 'obat'. Bahkan, istilah pengganti 'obat', yakni 'racun', pun tidak serta merta hilang dari perbendaharaan bahasa mereka sehariphari. Patut pula diperhatikan bahwa paradigma Revolusi Hijau masih melandasi berbagai kebijakan dan peraturan pemerintah.

Belum pula berbagai kesempatan yang dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan dari situasi sulit yang dihadapi petani, apakah itu dalam kelangkaan pupuk, atau serangan hama dan penyakit. Karena itu, kegiatan pendampingan untuk para alumni PHT pun dirancang secara serius melalui berbagai kegiatan SLPHT tindak lanjut dan 'Sains Petani'. Sebagai contoh adalah kegiatan blok hamparan tempat para petani sehamparan mendiskusikan masalah yang dihadapi dan mencari pemecahannya bersama-sama. Demikian pula berbagai program kegiatan yang dirancang oleh masing-masing kelompok untuk kemudian dibahas dan didiskusikan bersama dalam acara Seminar Petani. Kegiatan uji-coba yang dilakukan dalam kelompok atau secara individual pun didukung dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya melalui pendampingan individual maupun melalui kegiatan temu petani secara berkala. Contoh dari macam-macam uji coba itu adalah

- penangkaran benih kedelai berkualitas;
- pemupukan dengan gulma dan pupuk organik;
- pemotongan daun;
- pengendalian hama penggerek polong kedelai dengan lampu perangkap dan jaring;
- kaitan antara temperatur dan berjangkitnya penyakit;
- pola tanam kedelai dengan *pranata mangsa*;
- pestisida dengan 'resep tradisional' dan lain-lain (lihat Winarto dkk. 2000; Maidi, Darmadi, Darmowiyoto 2001)

Namun, hal itu tidak berarti bahwa mereka tidak menghadapi masalah dan kendala dalam upaya melaksanakan 'Sains Petani' dan berbagai upaya penyebaran 'benih-benih PHT' itu. Sikap skeptis dan apatis juga ditunjukkan oleh mereka yang belum memahami strategi

PHT seperti yang dijumpai di Batanghari, Lampung Tengah, dan Ciasem Baru, Jawa Barat. Tidak mudah mengubah persepsi, orientasi, dan nilai petani yang selama lebih dari tiga dekade terbentuk dalam paradigma Revolusi Hijau ke paradigma Pengendalian Hama Terpadu dalam sekejap. Apa yang dirintis sejumlah kecil petani PHT itu memakan waktu beberapa tahun sejak pertama kali diintroduksikannya program PHT di tahun 1993. Kegiatan-kegiatan itu dapat dilaksanakan hanya dengan dukungan penciptaan organisasi dan sarana penunjang berupa aturan, norma-norma, dan kesepakatan yang diciptakan bersama. Selain itu, terdapat itikad yang besar dari 'benih-benih PHT' itu dalam menumbuhkembangkan 'ilmu pengetahuan dan strategi cocok tanam' yang diyakininya sebagai yang 'jitu' dalam menjawab berbagai tantangan, mengembangkan jati diri, dan mengangkat harkat mereka. Suatu proses perubahan memang telah dan terus berlangsung. Bagaimanakah 'benih-benih pemberdayaan' itu bertumbuh kembang?

Benih-benih pemberdayaan

'Kita adalah petani yang "sekolah", mereka adalah petani yang "awam", "tidak sekolah",' itulah penjatidirian yang pertama kali saya jumpai di antara para petani PHT di Marga Tani di tahun 1990, setelah mereka menyelesaikan pelatihan SLPHT selama satu musim tanam. 'Alumni PHT', dan 'bukan alumni PHT' adalah juga kategorisasi yang tercipta setelah introduksi PHT di tengah-tengah komunitas mereka. Sekilas penamaan ini ingin menunjukkan adanya sesuatu yang berbeda di antara sesama mereka sebagai satu

kolektiva yang berkaitan dengan seperangkat pengetahuan baru yang dimiliki. Kata 'sekolah' dan 'alumni' itu sendiri memiliki kaitan dengan ide suatu kegiatan pendidikan. Namun, penamaan itu memiliki implikasi lebih jauh. Pendidikan yang dialami tidak sekedar memperkaya pengetahuan mereka, tetapi juga menumbuhkembangkan rasa percaya diri yang selama ini seakan tersisihkan. Tidak hanya tersisihkan, tetapi acapkali juga menjadi 'lenyap' bila berulangkali mereka mengalami gagal panen karena serangan hama dan penyakit, sekalipun berbagai upaya telah mereka lakukan. Belum lagi kesalahan yang ditimpakan pada mereka oleh para pejabat bila terjadi gagal panen. 'Petani tidak menggunakan "obat" seperti yang dianjurkan..., tidak menanam benih yang direkomendasikan, tidak menggunakan pupuk berimbang...,' dsbnya...dsbnya. Kriteria yang digunakan sebagai acuan acapkali amat sederhana, yakni sejauhmanakah praktik petani itu sesuai dengan rekomendasi pemerintah. Kepatuhan pada rekomendasi pemerintah menjadi panduan satu-satunya untuk bercocok tanam. Keberhasilan mereka pun dihargai bila dapat menghasilkan panen sekian ton/ha mendekati idaman pemerintah. Dengan belajar melalui SLPHT timbul kesadaran bahwa mereka dapat mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan rekomendasi pemerintah.

Inilah 'pemberdayaan' dalam hal yang amat sederhana, yakni dimilikinya keyakinan diri bahwa secara legal mereka diperkenankan memutuskan sendiri strategi pengelolaan lahan yang menurutnya 'jitu' sesuai dengan kondisi lahan dan sumberdaya yang dimiliki. Mengapa secara 'legal'? Petani PHT menyatakan bahwa 'sekolah lapang' itu dilaksanakan oleh pemerintah, dengan para pemandu yang juga agen-agen pemerintah, dengan bantuan dana dari

pemerintah pula. Jadi, pemerintahlah yang memungkinkan terwujudnya pengayaan pengetahuan dan pengambilan keputusan atas hasil observasi dan analisis mereka sendiri. Bukankah itu berarti 'pengakuan pemerintah' atas keputusan petani sendiri? Dengan legalisasi itulah para alumni PHT merasa memperoleh ruang untuk berkreasi tanpa rasa khawatir dan was-was bahwa strategi yang dilakukannya tidak sejalan dengan rekomendasi pemerintah, bahwa jika hasil panennya belum tentu berhasil merekalah yang nanti dikambinghitamkan atas kegagalan panen itu. Semudah itukah perolehan ruang untuk berkarya, berinovasi, dan bernegosiasi dengan berbagai pihak? Ternyata tidak.

Pengambilan keputusan atas strategi yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah tetap harus diperjuangkan dengan segala daya. Contoh yang amat jelas ialah konflik yang timbul di antara petani PHT dengan pejabat pertanian di tingkat kecamatan saat mereka menolak adanya komponen pestisida dalam paket kredit usaha tani. Ternyata kebijakan dan keputusan pemerintah merupakan harga mati yang tidak boleh tidak harus dipatuhi petani. Jika demikian, '...untuk apa kami disekolahkan?' keluh petani PHT di Marga Tani ketika mereka tidak mampu mengubah keputusan pemerintah. Hal yang sama ternyata berulang menjelang satu dasa warsa kemudian di Lampung Tengah saat petani PHT menyuarakan hal yang sama. Perubahan memang terjadi dalam kebijakan pemerintah, yakni diperkenankannya petani memilih sendiri jenis pestisida sesuai dengan minat dan kebutuhan petani. Tetapi, '...karena pestisida masih diperlukan buat jaga-jaga kalau nanti ada serangan hama dan penyakit, maka sebaiknya petani tetap memiliki persediaan "obat",' demikianlah penjelasan seorang kepala Koperasi Unit Desa saat

pertemuan menjelang pengisian Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk perolehan kredit. Keinginan petani di Karang Endah untuk memperoleh ganti komponen pestisida dalam bentuk uang agar dapat dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan cocok tanam pun tidak terpenuhi. Negosiasi dengan agen pemerintah nampaknya tidaklah berlangsung dengan mudah.

Di samping tantangan dan kendala di atas, dengan keteguhan sejumlah petani seperti di Karang Endah untuk tetap melaksanakan aktivitasnya, maka jerih payah mereka pun membuahkan hasil. Organisasi yang mereka bentuk dan kembangkan kini dikenal dengan nama *Wakak Jukok* yang dalam bahasa setempat, bahasa Lampung, berarti 'akar rumput'. Jati diri sebagai organisasi akar rumput itulah yang ingin mereka tonjolkan dan menjadi kebanggaan bahwa sebagai organisasi akar rumput, mereka mampu untuk berkarya. Proses belajar berorganisasi pun mereka alami. Tantangan dan kendala yang dihadapi tidaklah ringan dengan begitu banyaknya 'benih-benih PHT' yang mereka tebar dari musim ke musim yang memerlukan perawatan/pendampingan; dan terbatasnya jumlah petani pemandu di lain pihak. Pendampingan tidak hanya tertuju pada aktivitas untuk mengembangkan 'Sains Petani' dan konsistensi dalam melaksanakan prinsip pengendalian hama terpadu, tetapi juga pada pembentukan organisasi dan pemberdayaan. Hal ini merupakan bagian dari kegiatan yang seyogianya dilaksanakan para alumni PHT. Pemberdayaan dalam arti peningkatan kemampuan pengambilan keputusan untuk menanggulangi masalah yang dihadapinya sendiri, dan kemampuan bernegosiasi dengan pihak-pihak lain merupakan bagian dari program advokasi. Dalam setiap kesempatan untuk temu muka, dalam evaluasi kegiatan alumni PHT, lokakarya, atau seminar

petani, memotivasi petani agar mampu untuk secara kritis menganalisis dan mengambil keputusan telah menjadi bagian integral dari kegiatan pendampingan. Bahwa petanilah yang menjadi aktor utama pengambil keputusan dan bukan para pemandu, telah menjadi kriteria utama sebagai pemandu yang handal. Hal inilah yang harus terus dibina dalam proses belajar sebagai pemandu.

Keberanian berbicara di depan publik juga dilatih melalui penyampaian pendapat dan argumen mereka secara lisan. 'Diskusi', 'analisa', 'cari solusi', 'presentasi' telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa mereka sehari-hari. Menggambar, menulis, membuat bagan, skema juga telah menjadi bagian integral dari kegiatan diskusi, analisis, dan presentasi. Lebih dari satu dekade yang lalu, hal-hal semacam ini hanyalah merupakan bagian dari kegiatan penyuluhan para Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Kini, petani PHTlah yang melakukan hal itu. Presentasi di depan para ilmuwan, para pejabat pemerintah di tingkat desa sampai ke tingkat propinsi, bahkan juga staf menteri dan Menteri Pertanian itu sendiri tidak lagi merupakan hal yang 'aneh dan langka'. Penyusunan proposal, penulisan laporan dan makalah juga merupakan bagian dari kebudayaan petani pasca Pengendalian Hama Terpadu. Melalui mekanisme inilah mereka menyuarakan kepentingannya dan juga harapan yang diidamkan, yakni diperlakukannya petani sebagai mitra sederajat dalam pengambilan keputusan. Inilah hasil pemberdayaan yang diidamkan banyak petani-petani PHT. Namun, perjalanan mereka masih panjang.

Jika dalam konteks pelaksanaan paket-paket intensifikasi pertanian mereka harus bergulat dengan kebijakan pemerintah yang dianggapnya tidak sejalan dengan paradigma PHT, dalam konteks

otonomi daerah mereka harus berjuang menghadapi para pejabat pemerintah daerah setempat bila kebijakan dan keputusannya merugikan petani. Bagaimana agar mereka dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah daerah yang menyangkut nasib mereka pun masih merupakan suatu perjuangan. Pada tahun-tahun terakhir, dalam era globalisasi dengan semakin terbukanya 'dunia perdagangan bebas' antara negara-negara Asia Pasifik, dan penetapan kebijakan pangan sedunia, maka tantangan petani di Indonesia pun semakin berat. Introduksi benih-benih hasil rekayasa genetika melalui bioteknologi yang dikembangkan di negara maju merupakan salah satu 'momok' bagi petani. Trauma dari rekayasa genetika benih unggul dalam era Revolusi Hijau belumlah hilang. Kini ancaman serupa tetap membayang. Fenomena penanaman kapas hasil rekayasa genetika di Sulawesi Selatan sudah jelas merupakan kenyataan pahit bagi para petani kapas. Upaya untuk melakukan 'kongkalikong' di antara banyak pihak yang berkepentingan dengan upaya pengembangan pertanian, itulah yang dianalisis petani berada di balik berbagai kebijakan dan upaya tersebut (lihat Juwari, Hidayat dan Adinata 2002).

Upaya mengatasi berbagai tantangan itu tercermin dari program kerja Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) yang terbentuk pada tahun 1999. Sebagai organisasi berbasis 'jaringan yang nonhirarkhis', maka tujuan utama organisasi mereka pun ditetapkan sbb.:

1. memperkuat organisasi petani di tingkat kelompok untuk membangun kemandirian;
2. pendidikan/latihan dari petani ke petani (pendidikan penyadaran kesadaran);

3. pengembangan Sains Petani;
4. advokasi dalam upaya memperjuangkan, menuntut, dan membela hak-hak petani dan pemberdayaan peran petani;
5. membangun kesadaran peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan dan penghidupan petani (Gender); dan
6. mengembangkan Media Jaringan Petani Indonesia (lihat Juwari, Hidayat, dan Adinata 2002).

Melalui program kerja tersebut diharapkan 'kedaulatan petani' pun tercapai. Berdaulat dan terlepas dari 'kungkungan kekuasaan' itulah yang menjadi impian banyak petani. Kini mereka pun tengah memperjuangkan 'kedaulatan pangan'. Dalam perspektif mereka, kedaulatan pangan itu didefiniskan sebagai:

> ...hak setiap rakyat dan bangsanya untuk memiliki kemampuan memproduksi kebutuhan pokok pangan, dengan tetap memperhatikan produksi dan perbedaan budaya. Dengan demikian hak semua rakyat dan bangsanya untuk menentukan makanan yang dipilihnya, kapasitas produksi lokal di tingkat lokal dan perdagangan tingkat wilayah serta keterlibatan produsen (petani) dalam menentukan keputusan terutama yang berkenaan dengan kebijakan pertanian (Juwari, Hidayat dan Adinata 2002:2).

Dalam wujud yang paling nyata, petani kini memperjuangkan hak mereka untuk menanam dan membudidayakan varietas lokal yang telah tererosi selama lebih dari tiga dekade. Perjalanan panjang dalam hal ini pun masih harus ditempuh, tetapi 'benih-benih pemberdayaan' nampaknya telah tumbuh kembang di banyak tempat di Indonesia.